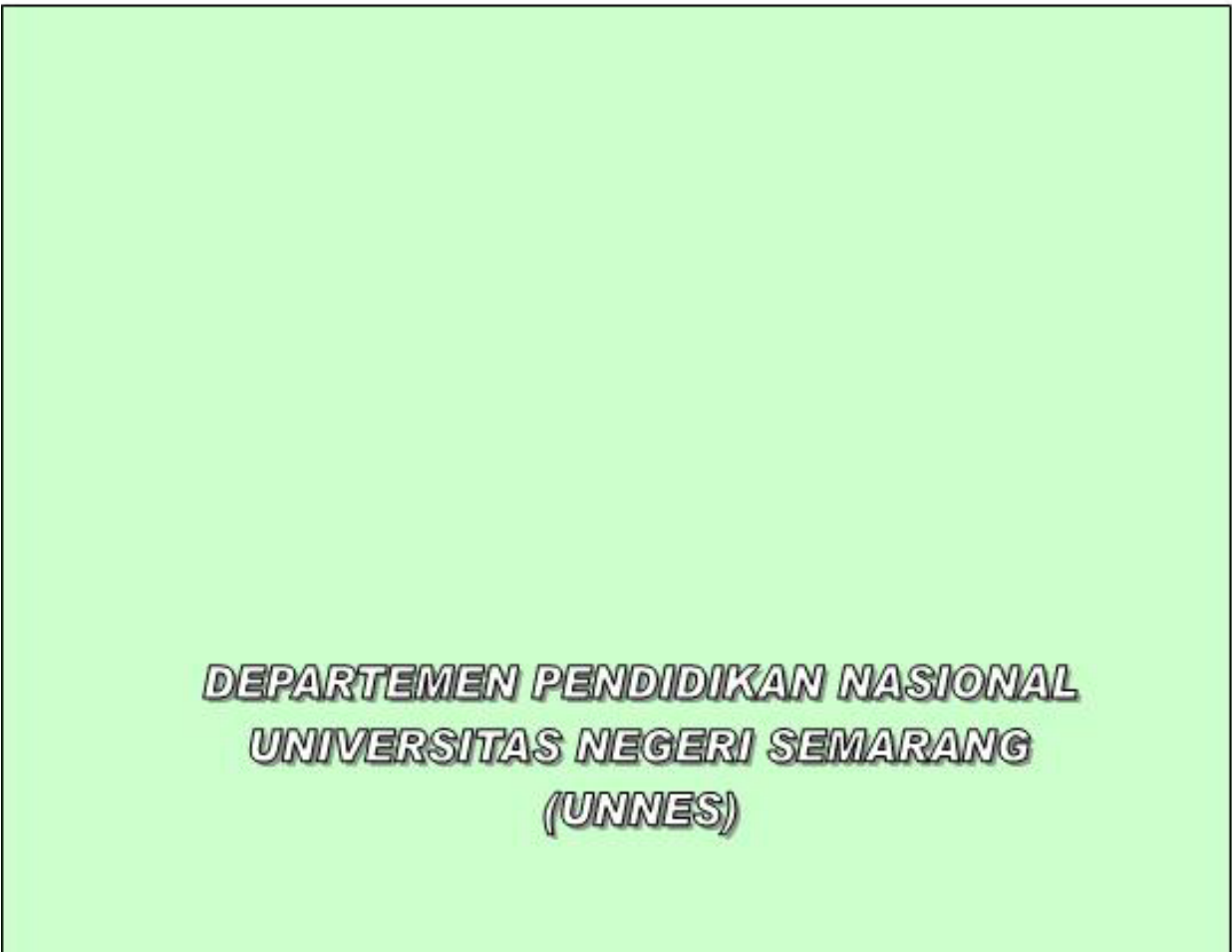


**RENCANA STRATEGIS UNNES
(RENSTRA)
2006 - 2010**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(UNNES)**

KATA PENGANTAR

Dunia pendidikan di Indonesia, menghadapi tantangan yang kian kompleks. Isu penting yang sering dikaitkan dengan dunia pendidikan di Indonesia saat ini adalah, lemahnya daya saing bangsa dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia. Melimpahnya sumber daya alam dan murahnya tenaga kerja bukan lagi menjadi faktor utama yang dapat menopang keunggulan bangsa. Keunggulan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologilah yang kini menjadi faktor penentu dalam persaingan antar bangsa yang semakin mengglobal.

Tiga pilar yang menjadi perhatian dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalah: (1) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Ketiga pilar ini diyakini akan menjadi arah strategis dalam pembangunan pendidikan tinggi, dan secara bertahap dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing bangsa.

Rencana Strategis (Renstra) Universitas Negeri Semarang (Unnes) Tahun 2006 – 2010 ini, disusun dalam kerangka pemikiran di atas. Harapannya akan dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang lebih terarah dan berkualitas. Dokumen dimaksud misalnya: (1) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP).

Teriring rasa syukur yang teramat dalam pada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas tersusunnya Renstra Unnes Tahun 2006 – 2010 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah dengan sungguh-sungguh

ikut membantu penyusunan dokumen ini. Semoga dengan tersusunnya Renstra Unnes 2006-2010 ini akan dapat menjadi arah dalam pembangunan Unnes lima tahun ke depan yang lebih berkualitas.

Semoga Allah SWT selalu meridloi seluruh upaya kita, untuk menuju Unnes yang Sutera (Sehat, Unggul dan Sejahtera). Amin.

Semarang, 2006

Rektor,



Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo,
M.Si.

NIP. 131125646

DAFTAR ISI

Halaman

	Kata Pengantar	i
	Daftar Isi	ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. LANDASAN PEMIKIRAN	1
	B. SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG ...	4
	1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga/STO (1960 – 1963)	4
	2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta Cabang Semarang (1963 – 1965)	5
	3. IKIP Semarang (1965-1999)	6
	4. Universitas Negeri Semarang (1999 - sekarang)	7
	B. VISI	11
	C. MISI	12
	D. TUJUAN	12
	E. TUGAS POKOK	13
BAB II	HASIL ANALISIS SITUASI	15
	A. SITUASI INTERNAL	15
	1. Kekuatan	15
	2. Kelemahan	17
	B. SITUASI EKSTERNAL	18
	1. Peluang	18
	2. Tantangan	19
BAB III	RENCANA STRATEGIS	20
	A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN ...	20
	B. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING .	20
	C. PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK	23
BAB IV	STRATEGI PEMBIAYAAN	41
	A. SUMBER DANA	41
	B. STRATEGI PENGGALIAN DANA	42
	C. STRATEGI PENGELOLAAN DANA	44
	D. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN	45
BAB V	SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI	47
	A. TUJUAN	48
	B. PRINSIP PELAKSANAAN	48

	C. STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI	49
	D. INDIKATOR KINERJA	53
BAB VI	PENUTUP	55
	A. KRITERIA KEBERHASILAN	55
	B. STANDAR KINERJA	55

BAB I PENDAHULUAN

A. LANDASAN PEMIKIRAN

Penyelenggaraan pendidikan tinggi bertujuan untuk menyiapkan generasi bangsa agar mempunyai kualitas akademik dan intelektual yang baik sehingga dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyiapkan calon-calon pemimpin masa depan yang berwawasan luas dan mampu menjawab tantangan bangsa dalam persaingan global yang semakin tajam. Oleh sebab itu, perguruan tinggi mempunyai posisi yang strategis terhadap kepentingan nasional. Mengingat posisi strategis tersebut maka di era desentralisasi ini, kewenangan kebijakan umum untuk perguruan tinggi masih dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan kewenangan operasional diherikan secara otonom kepada lembaga perguruan tinggi.

Sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) di wilayah masing-masing, lembaga perguruan tinggi diharapkan mampu mendorong penguasaan cabang ilmu dasar dan terapan, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sekitarnya. Melalui kemampuan tersebut perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi ujung tombak kreativitas dan inovasi guna merespon berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat baik di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, politik, sosial budaya, dan seni.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan perguruan tinggi, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, masalah pemerataan dan perluasan, terbatasnya daya tampung perguruan tinggi negeri dalam memberikan kesempatan kepada kelompok penduduk berusia 19-24 tahun untuk memperoleh pendidikan tinggi, dan asimetrisnya penyebaran geografis dan termasuk menyangkut pemerataan perguruan tinggi berkualitas tinggi sehingga: (1) terbatasnya kesempatan bagi calon mahasiswa potensial di daerah untuk memperoleh pendidikan tinggi yang baik; (2) terbatasnya akses pelaku pembangunan kepada sumber daya yang handal.

Kedua, masalah relevansi dan mutu, hal ini merupakan gejala umum yang melintas semua program kelembagaan, sumber daya pendidikan, dan program pembinaan mahasiswa. Semua masalah ini digolongkan dalam satu kategori tentang mutu dan relevansi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya pendidikan tinggi dan pembinaan mahasiswa.

Ketiga, masalah perilaku efektif sistem dalam peran kelembagaannya serta keefektifan dalam menyelenggarakan fungsi sistemiknya. Semua masalah ini dimasukkan dalam satu kategori tentang penataan sistem, yang penanganannya menyangkut pengembangan otonomi, akuntabilitas, dan pencitraan publik perguruan tinggi.

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut, tantangan ke depan pembangunan program pendidikan tinggi yang memerlukan perhatian tinggi, adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam kaitannya dengan perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan tinggi, tuntutan meningkatkan layanan yang lebih merata kepada masyarakat dapat diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga tantangan mewujudkan tersebut dimana di sisi lain semakin meningkatnya laju

pertumbuhan penduduk, perkembangan pendapatan masyarakat yang minim, yang sesuai dengan kebutuhan serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak merata. **Kedua**, dalam kaitannya dengan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi, bagaimana perguruan tinggi mampu menghadapi arus globalisasi terutama dalam perkembangan teknologi informasi. Dalam permasalahan ekonomi nasional, bagaimana perguruan tinggi, mampu memberikan kontribusi pada proses pemulihan ekonomi nasional. Dalam perkembangan sosial-budaya, bagaimana norma pendidikan tinggi di Indonesia mampu mengadopsi perubahan yang semula yang mengarah kepada universalisme, komunalisme, dan skeptisme menjadi spesifik, praktis dan berbasis potensi. Dalam bidang politik, paradigma baru di pendidikan tinggi yang menekankan pada prinsip-prinsip peningkatan kualitas yang berkelanjutan, efisiensi, akreditasi, otonomi, dan evaluasi diri-, menuntut kemampuan komunikasi publik untuk menyakinkan berbagai kalangan, termasuk kalangan elit politik dan birokrasi. **Ketiga**, dalam kaitannya dengan penataan sistem manajemen pendidikan tinggi, bagaimana meningkatkan otonomi pengelolaan perguruan tinggi secara luas dan bertahap dengan adanya pola pengelolaan regional, berdasarkan penerapan desentralisasi pendidikan.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan perguruan tinggi, maka strategi pengembangan Universitas Negeri Semarang dilaksanakan secara sinergis dengan permasalahan dan tantangan tersebut. Oleh karena itu seluruh arah pengembangan Unnes diarahkan pada 3 (tiga) pilar utama, meliputi: Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; serta penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Untuk menerapkan arah pengembangan tersebut diperlukan suatu rencana strategis agar arah pengembangan tersebut dapat

dicapai secara bertahap, mantap, dan efektif. Rencana strategis ini juga akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun perencanaan yang lebih operasional setiap tahunnya dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran (SP4), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dan sebagai dasar evaluasi dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (LAKIP).

B. SEJARAH SINGKAT UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Sejarah perkembangan Universitas Negeri Semarang (UNNES) yang sebelumnya bernama Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang dimulai dengan berdirinya berbagai lembaga pendidikan guru di atas jenjang SMTA. Lembaga-lembaga pendidikan guru tersebut adalah *Middelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A)* dan *Middelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B)*. Keduanya merupakan lembaga pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah Kolonial Belanda yang bertujuan menyiapkan guru-guru SMTP dan SMTA. Dengan Peraturan Pemerintah No. 41/1950, Kursus MO-A dijadikan Kursus B-I, sedangkan Kursus MO-B dijadikan Kursus B-II. Kursus-kursus dengan nama baru tersebut diselenggarakan kira-kira selama 10 tahun, yakni sampai dengan tahun 1960. Selanjutnya, perkembangan Unnes tampak dari tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Sekolah Tinggi Olahraga / STO (1960 – 1963)

Melalui keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan No. 108487/S, tanggal 27 Desember 1960, Kursus B-I dan Kursus B-II diintegrasikan ke dalam Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang dan menjadi sebuah fakultas yang disebut Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

(FKIP). FKIP Undip mempunyai cabang di Surakarta, yaitu hasil integrasi Kursus B-I dan Kursus B-II. Pada tahun 1963 Jurusan Pendidikan Jasmani, yang semula merupakan bagian dari Kursus B-II dan kemudian menjadi bagian dari FKIP Undip, dipisah dan dijadikan Sekolah Tinggi Olahraga (STO) yang berdiri sendiri. Pendirian STO ini dilakukan dengan Keputusan Menteri Olahraga No. 23 Tahun 1963, tanggal 19 April 1963. Sejak saat itu, STO berada di bawah Departemen Olahraga.

2. Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Yogyakarta Cabang Semarang (1963 – 1965)

Sementara FKIP Undip menjalankan program-program di dalam struktur Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP), pada tahun 1962 oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD dan K) didirikan pula lembaga pendidikan guru yang baru, yaitu Institut Pendidikan Guru (IPG) dengan fungsi dan tujuan yang sama dengan FKIP. Untuk menghindari dualisme dalam pendidikan guru tingkat pendidikan tinggi, Presiden RI dengan Keputusan No. 1/1963, tanggal 3 Januari 1963 menyatukan FKIP dan IPG menjadi IKIP yang setara dengan universitas di dalam lingkungan Departemen PTIP. Atas dasar Keputusan Presiden tersebut, Menteri PTIP mendirikan IKIP melalui Keputusan Menteri PTIP No. 55 Tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963. Sebagai tindak lanjutnya, diterbitkanlah Keputusan Bersama Menteri PTIP dan Menteri PD dan K No. 32 tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 tentang penyatuan FKIP dan IPG di Jakarta, Bandung, Malang, dan Yogyakarta ke dalam IKIP. Dengan adanya penggabungan FKIP dan IPG menjadi IKIP, sementara FKIP Undip dan FKIP Undip Cabang Surakarta dinilai belum dapat berdiri

sendiri, keluarlah Keputusan Menteri PTIP No. 35 Tahun 1964, tanggal 4 Mei 1964 yang menetapkan:

- a. FKIP Undip menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Semarang yang meliputi: Jurusan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Seni Rupa, Sejarah, Ilmu Bumi, Ilmu Pasti, Ilmu Alam, Ilmu Pesawat, Ilmu Kimia, Teknik Sipil, Teknik Mesin, Pendidikan Jasmani, Didaktik Kurikulum, dan Pendidikan Sosial;
- b. FKIP Undip Cabang Surakarta menjadi IKIP Yogyakarta Cabang Surakarta.

3. IKIP Semarang (1965-1999)

IKIP Yogyakarta Cabang Semarang berkembang dengan pesat. Agar perkembangannya lebih terarah pada masa mendatang, sambil menunggu Keputusan Presiden, Menteri PTIP menerbitkan Keputusan Menteri PTIP No. 40 Tahun 1965, tanggal 8 Maret 1965, yang menetapkan IKIP Yogyakarta Cabang Semarang menjadi IKIP Semarang yang terdiri atas Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik. Selanjutnya, berdirinya IKIP Semarang itu diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 271 Tahun 1965, tanggal 14 September 1965.

Melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.042/O/77 tanggal 22 Februari 1977 program pendidikan guru olahraga kembali lagi ke dalam induknya dalam wadah baru yang disebut Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan (FKIK).

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/1982, IKIP Semarang memiliki enam fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan.

Dengan terbitnya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diikuti dengan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, terbitlah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0463/O/1992 tentang Statuta IKIP Semarang dan No. 0185/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja IKIP Semarang.

4. Universitas Negeri Semarang (1999 – 2007)

Dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas, IKIP Semarang kemudian bernama Universitas Negeri Semarang.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNNES dan No.225/O/2000 tentang Statuta UNNES, nama-nama fakultas di lingkungan UNNES sebagai berikut:

- a. Fakultas Ilmu Pendidikan;
- b. Fakultas Bahasa dan Seni;
- c. Fakultas Ilmu Sosial;
- d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- e. Fakultas Teknik;
- f. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
- g. Program Pascasarjana

Fakultas, Jurusan, dan program studi di lingkungan Unnes sejak tahun 2000 sampai dengan 2007 adalah sebagai berikut.

a. Fakultas Ilmu Pendidikan

- 1) Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan terdiri atas Prodi Teknologi Pendidikan (S1);
- 2) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas Prodi Pendidikan Luar Sekolah (S1);
- 3) Jurusan Bimbingan dan Konseling terdiri atas Prodi Bimbingan dan Konseling (S1);
- 4) Jurusan Psikologi terdiri atas Prodi Psikologi (S1);
- 5) Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar terdiri atas Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) dan Pendidikan Guru Kelas Sekolah Dasar (D2);
- 6) Program Pendidikan Guru Taman Kanak-kanak (D2).

b. Fakultas Bahasa dan Seni

- 1) Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan daerah terdiri atas Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1), Sastra Indonesia (S1), Pendidikan Bahasa Jawa (S1), dan Sastra Jawa (S1);
- 2) Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris terdiri atas Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (S1), dan Sastra Inggris (S1);
- 3) Jurusan Bahasa dan Sastra Asing terdiri atas Prodi Pendidikan Bahasa Prancis (S1), Sastra Prancis (S1), Bahasa Prancis (D3), Pendidikan Bahasa Jepang (S1), Bahasa Jepang (D3), dan Pendidikan Bahasa Arab (S1);
- 4) Jurusan Seni Rupa terdiri atas Prodi Pendidikan Seni Rupa (S1), Seni Rupa (S1), dan Desain Komunikasi Visual (D3);
- 5) Jurusan Seni Drama, Tari dan Musik terdiri atas Prodi Pendidikan Seni Tari dan Pendidikan Seni Musik.

c. Fakultas Ilmu Sosial

- 1) Jurusan Sejarah terdiri atas Prodi Pendidikan Sejarah (S1) dan Ilmu Sejarah (S1);
- 2) Jurusan Geografi terdiri atas Prodi Pendidikan Geografi (S1), Geografi (S1), dan Survey dan Pemetaan Wilayah (D3);
- 3) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan terdiri atas Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1), Ilmu Hukum (S1), dan Manajemen Pertanahan (D3);
- 4) Jurusan Sosiologi dan Antropologi terdiri atas Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi (S1).

d. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

- 1) Jurusan Matematika terdiri atas Prodi Pendidikan Matematika (S1), Matematika (S1), dan Statistika Terapan dan Komputasi (D3);
- 2) Jurusan Fisika terdiri atas Prodi Pendidikan Fisika (S1), dan Fisika (S1);
- 3) Jurusan Kimia terdiri atas Prodi Pendidikan Kimia (S1) dan Kimia (S1);
- 4) Jurusan Biologi terdiri atas Prodi Pendidikan Biologi (S1) dan Biologi (S1).

e. Fakultas Teknik

- 1) Jurusan Teknik Sipil terdiri atas Prodi Pendidikan Teknik Bangunan (S1), Teknik Sipil (S1), Teknik Sipil (D3), dan Teknik Arsitektur (S1);
- 2) Jurusan Teknik Mesin terdiri atas Prodi Pendidikan Teknik Mesin (S1), Teknik Mesin (S1), Teknik Mesin (D3), dan Teknik Kimia (D3);

- 3) Jurusan Teknik Elektro terdiri atas Prodi Pendidikan Teknik Elektro (S1), Teknik Elektro (S1), Teknik Elektro-Instalasi Listrik (D3), dan Teknik Elektro-Instrumentasi dan Kendali (D3);
 - 4) Jurusan Teknologi Jasa dan Produksi terdiri atas Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (S1), Teknologi Jasa dan Produksi Busana (D3), dan Teknologi Jasa, Produksi Boga (D3).
- f. Fakultas Ilmu Keolahragaan
- 1) Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi terdiri atas Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi (S1) dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (D2);
 - 2) Jurusan Ilmu Keolahragaan terdiri atas Prodi Ilmu Keolahragaan (S1);
 - 3) Jurusan Ilmu Kepeleatihan terdiri atas Prodi Pendidikan Ilmu Kepeleatihan Olahraga (S1);
 - 4) Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat terdiri atas Prodi Ilmu Ke-sehatan Masyarakat (S1).
- g. Fakultas Ekonomi berdiri, yang berdiri atas dasar Surat Izin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 1850/D/T/2006, tanggal 6 Juni 2006, dan Surat Keputusan Rektor Unnes nomor 59/O/2006, tanggal 8 Juni 2006, terdiri atas:
- 1) Jurusan Ekonomi Pembangunan terdiri atas Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi (S1), dan Ekonomi Pembangunan (S1);
 - 2) Jurusan Manajemen terdiri atas Prodi Pendidikan Ekonomi Administrasi Perkantoran (S1), Manajemen (S1), dan Manajemen Perkantoran (D3);

- 3) Jurusan Akuntansi terdiri atas Prodi Pendidikan Akuntansi (S1), Akuntansi (S1), dan Akuntansi (D3).

h. Program Pascasarjana terdiri atas :

- 1) Program Studi Teknologi Pendidikan (S2);
- 2) Program Studi Manajemen Pendidikan (S2);
- 3) Program Studi Manajemen Pendidikan (S3);
- 4) Program Studi Bimbingan dan Konseling (S2);
- 5) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia (S2);
- 6) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris (S2);
- 7) Program Studi Pendidikan Bahasa (S3);
- 8) Program Studi Pendidikan Seni (S2);
- 9) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (S2);
- 10) Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (S2);
- 11) Program Studi Pendidikan Matematika (S2);
- 12) Program Studi Pendidikan Olahraga (S2);
- 13) Program Studi Pendidikan Olahraga (S3);
- 14) Program Studi Kurikulum dan Pembelajaran (S2);

Meskipun telah berubah menjadi universitas, Unnes tetap berfungsi sebagai LPTK yang mengutamakan program studi kependidikan. Program studi nonkependidikan dimaksudkan untuk mendukung penguatan program-program studi kependidikan.

B. VISI

Unnes sebagai universitas bertaraf internasional yang sehat, unggul dan sejahtera.

C. MISI

Unnes mengemban misi untuk:

- a. menyiapkan tenaga di bidang kependidikan dan non-kependidikan;
- b. mendidik mahasiswa agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, vokasi dan/atau profesi;
- c. menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, budaya dan seni.

D. TUJUAN

Sesuai dengan Statuta, Universitas Negeri Semarang bertujuan :

1. menyiapkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan dengan memperhatikan jumlah, mutu, relevansi, dan keefektifan;
2. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, olah raga, seni, dan budaya, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Secara operasional, tujuan pendidikan di Unnes adalah :

1. menyiapkan tenaga ahli dan profesional di bidang ilmu kependidikan dan nonkependidikan dengan memperhatikan mutu, relevansi, keefektifan, dan pemerataan;
2. menyebarkan ilmu, teknologi, olahraga, seni, dan budaya;
3. mengupayakan kemanfaatan ilmu, teknologi, olahraga, seni dan budaya, mendorong meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan memperkaya serta melestarikan kebudayaan nasional;
4. meningkatkan dukungan dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan dari sumber-sumber lain yang tidak mengikat;

5. mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan toleransi terhadap perbedaan pendapat antar dosen dan sivitas akademika yang lain.

Untuk mencapai tujuan tersebut, selain terus meningkatkan dan mengembangkan program-program sarjana dan diploma kependidikan dan nonkependidikan yang telah ada, Unnes juga mengupayakan pembukaan program-program nonkependidikan yang paralel dengan program-program kependidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini telah tercapai semuanya pada tahun 2004/2005 sehingga dalam perkembangan selanjutnya Unnes dapat berpartisipasi secara memadai dalam rangka peningkatan daya tampung dan peningkatan kualitas pendidikan tinggi serta sekaligus ikut menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, program-program Unnes direncanakan secara terpadu dan pendekatan aktif dengan berbagai pihak terkait yang telah terjalin selama ini akan diteruskan dan ditingkatkan. Perhatian lebih khusus akan diberikan kepada pemerintahan daerah, sejalan dengan otonomi daerah dan, semangat kerja sama yang saling menguntungkan.

E. TUGAS POKOK

UNNES menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam sejumlah bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, baik kependidikan maupun nonkependidikan. Tugas pokok Unnes meliputi:

1. pendidikan dan pengajaran pendidikan tinggi;

2. penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, seni, dan budaya;
3. pengabdian kepada masyarakat;
4. pembinaan tenaga dosen, administrasi, pustakawan, teknisi dan laboran dalam hubungannya dengan lingkungan;
5. pengembangan sarana dan prasarana pendidikan;
6. peningkatan dukungan, baik dari pemerintah maupun swasta;
7. pengembangan kemampuan berkomunikasi, keberanian membela kebenaran, toleransi terhadap perbedaan pendapat, dan menghormati keyakinan orang lain agar tercipta kerukunan yang sehat.

BAB II HASIL ANALISIS SITUASI

A. SITUASI INTERNAL

1. Kekuatan

UNNES memiliki aset tanah kampus Sekaran seluas sekitar 1.251.416 M², Sebagian telah dimanfaatkan untuk bangunan 7 fakultas, rektorat, perpustakaan, gedung gelar karya, koperasi, bank, kantor pos, pusat kegiatan mahasiswa, poliklinik, kafetaria, dan masjid. Terdapat juga aset di luar kampus Sekaran, yakni tanah dan bangunan di jalan Kelud seluas 53.477 m² yang antara lain dimanfaatkan sebagai gedung auditorium, UNNES Press, koperasi, toko buku, warnet, apotek, bank. Ada pula Kampus Tegal seluas 25.000 m² yang digunakan untuk kegiatan PGSD dan Kampus Wonosari Tugu seluas 53.613 m² yang digunakan untuk kegiatan PGSD dan PGTK, Kampus Bendan 25.006 m² digunakan untuk Program Pascasarjana. Di samping itu UNNES juga memiliki Kampus Pegandan seluas 28.345 m² yang selama ini digunakan untuk kegiatan olahraga. UNNES juga masih memiliki lahan dan bangunan di jalan Rejosari Semarang seluas 836 m² dan di Suwakul Ungaran seluas 5.542 m² yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam rangka memanfaatkan seluruh lahan kampus secara optimal, UNNES telah memiliki master plan 2006-2025 yang menjadi acuan dalam pengembangan UNNES untuk 20 tahun ke depan.

Pada tahun akademik 2006/2007, jumlah dosen sebanyak 968 orang dengan kualifikasi S3 sebanyak 58 orang; S2 sebanyak 590 orang dan S1 sebanyak 320 orang, di antaranya adalah Guru Besar sebanyak 38 orang dengan rincian yang masih aktif 28

orang dan Guru Besar Emeritus 10 orang. Sementara itu tenaga administrasi 489 orang, 20 orang diantaranya berkualifikasi pendidikan S2. Jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2006/2007 sebanyak 22.640 orang, dengan rincian Program Kependidikan S3 sebanyak 56 orang, S2 sebanyak 483 orang, S1 sebanyak 11.555 orang, program D2 PGSD /PGPJSD / PGTK sebanyak 3.173 orang, dan program nonkependidikan S1 sebanyak 5.987 orang, D3 sebanyak 1.386 orang.

Dalam rangka menyatukan rektorat, lembaga, perpustakaan, fakultas dan unit-unit lain, pada akhir tahun 2006 di kampus Sekaran telah dibangun jaringan tulang punggung *Fiber Optic (FO)*. Saat ini jaringan tersebut telah menghubungkan sekitar 300 pc di seluruh Universitas. Jaringan ini telah dilengkapi dengan fasilitas *teleconference* yang terhubung melalui fasilitas jaringan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) melalui program *indonesian higher education network (inherent)*. Dengan fasilitas ini UNNES dapat melakukan *informations and resources sharing* dengan seluruh perguruan tinggi yang tergabung dalam jaringan program *inherent*.

Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, sejak dua tahun terakhir telah dikembangkan sistem informasi manajemen (SIM) sebagai pendukung tata kelola manajemen perguruan tinggi secara modern. Salah satu produk yang telah mendekati optimal adalah sistem informasi akademik terpadu (Sikadu). Pada saat ini Sikadu telah mampu mengoptimalkan sistem pelayanan dan administrasi penerimaan mahasiswa baru, registrasi, yudisium, dan pendaftaran wisuda secara *on line*.

2. Kelemahan

Kelemahan internal meliputi aspek manajemen, ketenagaan, sarana dan prasarana, dan budaya akademik. Dalam hal manajemen, UNNES belum memiliki standar operasional prosedur (SOP) dan uraian jabatan yang sempurna, demikian pula sistem tata kelola kampus antara kampus UNNES Sekaran dengan kampus UNNES di luar Kampus Sekaran belum terintegrasi.

Pengembangan SDM, baik dosen maupun tenaga administrasi, belum terencana dengan baik. Jumlah teknisi dan laboran yang berkualitas masih terbatas. Rekrutmen tenaga pengajar belum sesuai dengan kebutuhan program studi terutama dalam hal kuantitas. Kemampuan berbahasa Inggris dosen, mahasiswa dan tenaga administrasi juga masih perlu ditingkatkan. Pelayanan pengusulan peningkatan karir dosen dan tenaga administrasi, teknisi, laboran, dan pustakawan belum optimal.

Sumber dana yang berasal dari pemerintah dan masyarakat masih jauh dari memadai. *Unit cost* mahasiswa UNNES per tahun Rp 4.715.000, 00 (empat juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sedangkan *unit cost* yang ideal sebesar Rp 18.000.000,00 (delapanbelas juta rupiah).

Terkait sarana dan prasarana dapat diidentifikasi kelemahan yang meliputi sarana laboratorium/bengkel belum memenuhi kebutuhan; bahan pustaka di perpustakaan belum mencukupi dan sebagian besar ketinggalan jaman; sarana transportasi ke kampus masih terbatas; sarana penunjang

pengajaran yang berbasis ICT dan peralatan laboratorium belum memadai.

Dalam kaitannya dengan inventarisasi aset kampus, ada beberapa lahan kampus yang masih dalam proses sertifikasi. Hal ini menjadi salah satu kelemahan dalam pengembangan UNNES pada masa yang akan datang.

Selain itu, dalam hal budaya akademik, dapat dikatakan bahwa produktivitas karya ilmiah, frekuensi seminar, diskusi, dan lokakarya masih rendah. Sikap profesional dosen juga masih belum optimal karena orientasi utamanya lebih banyak pada tugas-tugas bidang pendidikan dan pengajaran, kurang memperhatikan tugas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditandai dengan masih terbatasnya buku ajar yang dihasilkan oleh dosen, jurnal terakreditasi nasional, pencapaian HaKI, dan karya ilmiah lain.

B. SITUASI EKSTERNAL

Dalam upaya mengembangkan UNNES ke depan, faktor-faktor eksternal menjadi sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan karena faktor-faktor tersebut dapat merupakan tantangan sekaligus peluang.

1. Peluang

Peluang yang harus dimanfaatkan oleh UNNES adalah adanya otonomi dan desentralisasi kampus, adanya sumber dana dari masyarakat dan bantuan luar negeri, jumlah peminat masuk UNNES yang selalu meningkat dari tahun ke tahun; kebutuhan masyarakat terhadap lulusan perguruan tinggi makin meningkat; lapangan kerja pada masa mendatang yang makin terbuka dan beragam; peran UNNES dalam uji kualifikasi dan sertifikasi sesuai dengan UUGD nomor 14 Tahun 2005; kampus UNNES terletak di

daerah yang biaya hidupnya relatif lebih murah; kesempatan memperoleh pendidikan lanjut bagi para dosen dan tenaga administrasi terbuka.

2. Tantangan

Faktor-faktor yang merupakan tantangan adalah perubahan nilai-nilai di masyarakat yang cepat; kemajuan di bidang teknologi dan telematika; globalisasi pendidikan; dan perdagangan bebas; persiapan menghadapi otonomi perguruan tinggi; kemajuan teknologi informasi; peningkatan kebutuhan anggaran perguruan tinggi yang tidak sebanding dengan pemasukan; dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas lulusan; realisasi strategi pendidikan jangka panjang 2003 – 2010 yang bertumpu pada daya saing bangsa, otonomi dan desentralisasi serta kesehatan organisasi; realisasi paradigma baru perguruan tinggi yang bertumpu pada kualitas, otonomi, akuntabilitas, evaluasi dan, akreditasi; pengembangan profesionalisme dan kualitas pembelajaran yang mengacu pada prinsip-prinsip yang direkomendasikan UNESCO; pengembangan sistem kelembagaan, manajemen, SDM, dan kesejahteraan berdasarkan prinsip demokrasi, profesional, budaya, akademik, dan religius; implementasi *master plan* UNNES 2006 - 2025.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Strategi pengembangan Universitas Negeri Semarang lima tahun mendatang dari 2006 sampai dengan 2010, diarahkan pada tiga pilar utama, meliputi: Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan, Peningkatan Mutu, Relevansi, dan Daya Saing, Penguatan Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Pencitraan Publik. Melalui pengembangan tiga pilar tersebut, diharapkan visi dan misi Unnes secara bertahap dapat tercapai.

Tiga pilar utama di atas, dijabarkan dalam 57 (lima puluh tujuh) sasaran sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

1. Perluasan akses perguruan tinggi
 - a. Perintisan Fakultas baru
 - b. Perintisan program studi baru
 - c. Pengembangan jejaring kerjasama
 - d. Akses sumber dana hibah kompetisi dan internasional
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai pembelajaran jarak jauh
 - a. sarana Perintisan program *e- learning*
3. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses PT
 - a. Peningkatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa
 - b. Beasiswa
 - b. Rusunawa

B. PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI, DAN DAYA SAING

1. Implementasi dan Penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan
 - a. Pengembangan kurikulum

- b. Peningkatan kualitas Program, Proses dan Hasil Pembelajaran (perencanaan, proses: metode & media, evaluasi)
2. Penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP
 - a. Optimalisasi peran penjaminan mutu
 - b. Peningkatan peran Bimbingan Konseling Mahasiswa
 - c. Pemberdayaan monitoring dan evaluasi internal
3. Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi
 - a. Peningkatan budaya akademik (*academic culture*)
 - b. Optimalisasi pemberlakuan Sistem Kredit Semester (SKS)
 - c. Peningkatan hasil akreditasi program studi
 - d. Vitalisasi sistem evaluasi diri
4. Pengembangan Guru sebagai Profesi
 - a. Pelaksanaan Sertifikasi
 - b. Peran serta program kualifikasi dan sertifikasi guru, dan keahlian profesional.
5. Pengembangan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan
 - a. Penataan & penguatan sistem pembinaan kemahasiswaan
 - b. Peningkatan disiplin dan etika mahasiswa
 - c. Peningkatan kualifikasi pendidikan dosen
 - d. Peningkatan etos, disiplin kerja, dan kepribadian dosen dan tenaga administrasi
 - e. Peningkatan kesejahteraan
6. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi
 - a. Penguatan fungsi perpustakaan
 - b. Penguatan fungsi laboratorium pendidikan
 - c. Pembangunan sarana penunjang pendidikan.

- d. Perintisan pembangunan kampus Kelud sebagai kampus pascasarjana, *business* dan *training centre*.
 - e. Pembangunan Kampung Budaya FBS sebagai pusat pembelajaran pemahaman antarbudaya (*Cross Cultural Understanding*)
 - f. Pembangunan prasarana lingkungan kampus.
 - g. Penataan kembali batas lahan Unnes
 - h. Pengadaan sarana perkuliahan dan praktik laboratorium fakultas
7. Perluasan pendidikan kecakapan hidup
 - a. Pengembangan pendidikan kewirausahaan kampus
 8. Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia
 - a. Perintisan kelas imersi
 - b. Pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri
 9. Akselerasi jumlah program studi vokasi, dan profesi
 - a. Peningkatan program studi vokasi
 - b. Peningkatan program studi profesi
 10. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HaKI
 - a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian
 - b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat
 - c. Perolehan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)
 11. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan
 - a. Pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT
 - b. Peningkatan kemampuan penerapan ICT

c. Optimalisasi fungsi sarana *teleconference*

C. PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran
 - a. Pengembangan sistem perencanaan berbasis kerja
 - b. Penataan sistem pengelolaan anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah
 - c. Penataan pengelolaan barang milik pemerintah
2. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat
 - a. Peningkatan keahlian dan spesifikasi staf.
3. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan
 - b. Penguatan kapasitas lembaga menuju BHPT
 - c. Peningkatan layanan administrasi akademik, umum, sistem informasi, dan kemahasiswaan.
 - d. Penataan dan penguatan Lembaga Kemahasiswaan
4. Peningkatan pencitraan publik
 - a. Publikasi kegiatan kemahasiswaan (pencitraan publik)
 - b. Pemberdayaan alumni
 - c. Fasilitasi bursa kerja
 - d. Promosi keunggulan universitas
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan
 - a. Pemberdayaan auditor internal
6. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi
 - a. Sistem Informasi Manajemen Akademik
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG)
 - c. Pengembangan Sistem Informasi Aset (SIA)
 - d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan

- e. Integrasi sistem informasi akademik, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana

Departemen Pendidikan Nasional
Universitas Negeri Semarang
Rencana Strategis Tahun 2006-2010

PEMERATAAN DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
Perluasan akses perguruan tinggi					
Memperluas akses perguruan tinggi melalui perintisan fakultas, akreditasi, pengembangan jejaring kerjasama dan akses sumber-sumber dana internasional	Perintisan Fakultas Hukum, Psikologi, IKM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperolehnya izin pendirian fakultas Hukum paling lambat tahun 2010 2. Diperolehnya ijin pendirian fakultas Psikologi paling lambat tahun 2010 3. Diperolehnya izin pendirian fakultas IKM paling lambat tahun 2010 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada perintisan fakultas, akreditasi, pengembangan jejaring kerjasama dan akses sumber-sumber dana internasional untuk memperluas akses perguruan tinggi	Perintisan Fakultas Hukum, Psikologi, IKM	
	Terwujudnya hasil Akreditasi Program Studi	Semua program studi memperoleh nilai akreditasi minimal B		Akreditasi Program Studi	
	Terbentuknya Pengembangan jejaring kerjasama	Meningkatnya jalinan kerja sama (kuantitas dan kualitas) dengan berbagai pihak (dalam dan luar negeri)		Pembentukan Pengembangan jejaring kerjasama	
	Terwujudnya Akses sumber-sumber dana internasional	Diperolehnya sumber pendanaan dari berbagai lembaga donor (dalam dan luar negeri)		Peningkatan akses sumber-sumber dana internasional	
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi sebagai sarana Pembelajaran Jarak Jauh					
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui program e-learning	Terwujudnya program e-learning	Terlaksananya pembelajaran dengan sistem e-learning	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan	Perintisan program <i>e-learning</i>	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
			komunikasi untuk proses pembelajaran.		
Peningkatan peran serta masyarakat dalam perluasan akses PT					
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perluasan akses perguruan tinggi melalui keterlibatan masyarakat dalam pemberian beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa	Meningkatnya pelayanan kesejahteraan mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perolehan beasiswa meningkat 2. Jumlah penerima beasiswa meningkat. 3. Akses penyandang dana; negeri-swasta, dalam dan luar negeri berkembang. 4. Tersedia asrama mahasiswa yang representatif. 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pemberian beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa	Peningkatan pelayanan kesejahteraan mahasiswa	

PENINGKATAN MUTU, RELEVANSI DAN DAYA SAING

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
A. Implementasi dan Penyempurnaan Standar Nasional Pendidikan					
Mengimplementasikan dan menyempurnakan Standar Nasional Pendidikan melalui pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas program, proses, dan hasil belajar mahasiswa	<p>Terwujudnya kurikulum perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan</p> <p>Meningkatnya kualitas program, proses dan hasil belajar mahasiswa (perencanaan, proses: metode & media, evaluasi)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dimilikinya kurikulum yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan 2. Terlaksananya proses pembelajaran sesuai kurikulum <ol style="list-style-type: none"> 1. Terakreditasinya semua program studi dengan nilai minimal B 2. Terwujudnya dokumen silabi, rencana pembelajaran, dan hand out 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas program, proses, dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka implementasi dan penyempurnaan SNP	<p>Pengembangan kurikulum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas program, proses dan hasil belajar mahasiswa (perencanaan, proses, dan evaluasi) 2. Monitoring dan evaluasi PBM secara on line 	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		dalam SIKADU on line. 3. Tersusunnya dokumen indek kinerja dosen. 4. Sebanyak 40% mahasiswa meraih indek prestasi (IPK) $\geq 3,00$. 5. Sebanyak 70% mahasiswa lulus tepat waktu			
B. Penjaminan mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP					
Melaksanakan penjaminan mutu secara terprogram melalui peningkatan peran penjaminan mutu, bimbingan konseling mahasiswa, dan pemberdayaan monitoring	Optimalnya peran penjaminan mutu akademik dalam upaya pencapaian visi misi univrsitas.	1. Terwujudnya dokumen : a. Kebijakan akademik b. Standar mutu akademik c. Kompetensi lulusan d. Spesifikasi Program Studi e. Kurikulum dan peta kurikulum f. Program pembelajaran 2. Persentase peningkatan peran penjaminan mutu. 3. Laporan hasil monitoring dan evaluasi penjaminan mutu akademik.	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan peran penjaminan mutu, bimbingan konseling mahasiswa, dan pemberdayaan monitoring untuk menjamin mutu secara terprogram dengan mengacu pada SNP	1. Penyusunan naskah dokumen penjaminan mutu akademik 2. Peningkatan peran penjaminan mutu. 3. Pemantauan ketercapaian standar mutu akademik 4. Evaluasi dan pemantapan kurikulum	
	Meningkatnya peran Bimbingan Konseling Mahasiswa	1. Terlaksananya sosialisasi Bimbingan Konseling secara teratur di masing-masing fakultas 2. Terlayannya secara optimal layanan konseling bagi mahasiswa yang membutuhkan.		Peningkatan peran Bimbingan Konseling mahasiswa	
	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	1. Terbentuknya Tim monitoring dan evaluasi internal		Pemberdayaan monitoring dan evaluasi internal	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	internal Perguruan Tinggi	Perguruan Tinggi 2. Terlaksannya kegiatan akademik (pendidikan dan Pengajaran secara optimal)			
C. Perluasan dan Peningkatan Mutu Akreditasi					
Memperluas dan meningkatkan mutu akreditasi melalui peningkatan budaya akademik, pemberlakuan SKS murni, akreditasi program studi, dan vitalisasi sistem evaluasi diri	Meningkatnya budaya akademik (<i>academic community</i>)	1. Terlaksananya seminar, lokakarya, workshop berskala internasional minimal 3 kegiatan tiap tahun. 2. Terlaksananya seminar berskala nasional pada tiap-tiap fakultas.	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan budaya akademik, pemberlakuan SKS murni, akreditasi program studi, dan vitalisasi sistem evaluasi diri untuk memperluas dan meningkatkan mutu akreditasi	Peningkatan budaya akademik (<i>academic community</i>) melalui kegiatan seminar, lokakarya, workshop.	
	Optimalisasi pemberlakuan SKS Murni	Terwujudnya pemberlakuan SKS murni dalam bidang akademik.		Pemberlakuan SKS murni dalam bidang akademik secara bertahap	
	Terwujudnya hasil Akreditasi Program Studi	Semua program studi memperoleh nilai akreditasi minimal B		Akreditasi Program Studi	
	Vitalisasi sistem evaluasi diri	1. Tersedianya bank data. 2. Tersusunnya mekanisme dan sistem penyusunan evaluasi diri. 3. Tersusunnya laporan evaluasi diri yang komprehensif dan tepat waktu.		Vitalisasi sistem evaluasi diri	
D. Pengembangan Guru sebagai Profesi					
Mengembangkan kompetensi guru sebagai profesi melalui pelaksanaan kualifikasi dan sertifikasi guru dan keahlian profesional	Peran serta program Kualifikasi dan Sertifikasi guru, dan keahlian profesional	1. Diperolehnya kewenangan melaksanakan uji sertifikasi bagi guru di Jawa Tengah 2. Diperolehnya kewenangan melaksanakan uji sertifikasi keahlian profesional		Peningkatan peran serta pelaksanaan program Kualifikasi dan Sertifikasi guru, dan keahlian profesional	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
E. Pengembangan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan					
Mengembangkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui penataan sistem pembinaan lembaga kemahasiswaan, peningkatan disiplin dan etika mahasiswa, etos kerja, dan kesejahteraan pegawai	Diperolehnya sistem dan model pembinaan lembaga kemahasiswaan yang dinamis dan mampu mengakomodir aspirasi mahasiswa serta dapat melibatkan para dosen yang berkompeten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sistem pembinaan kemaasiswaan secara berjenjang dan efektif. 2. Terwujudnya dinamika kegiatan kemahasiswaan yang lebih banyak melibatkan mahasiswa. 3. Terlibatnya para dosen yang berkompeten dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada penataan sistem pembinaan lembaga kemahasiswaan, peningkatan disiplin dan etika mahasiswa, etos kerja, dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mengembangkan kompetensi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan	Penataan sistem pembinaan lembaga kemahasiswaan	
	Meningkatnya disiplin dan etika mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pedoman etika mahasiswa. 2. Etika bergaul baik 3. Etika berbusana baik 4. Etika berbicara baik 		Peningkatan disiplin dan etika mahasiswa	
	Meningkatnya etos, disiplin kerja, dan kepribadian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditaatinya jam kerja pegawai sesuai dengan aturan yang berlaku. 2. Minimalnya pelanggaran disiplin kepegawaian. 3. Naiknya produktivitas pegawai. 		Peningkatan etos, disiplin kerja, dan kepribadian	
	Meningkatnya kesejahteraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan pegawai honorer (kontrak) sesuai dengan UMK Semarang. 2. Pemberian dan peningkatan insentif dosen dan karyawan 3. Terciptanya pola pengembangan karier yang lebih berkualitas. 		Peningkatan kesejahteraan pegawai	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		4. Tersedianya layanan kesehatan, bus kampus, parkir bagi pegawai secara gratis. 5. Terciptanya suasana kerja yang kondusif untuk kelancaran aktivitas kerja pegawai.			
F. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi					
Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana perguruan tinggi	Menguatnya fungsi dan peran perpustakaan	1. Meningkatnya jumlah koleksi buku perpustakaan dan jurnal-jurnal ilmiah terbitan mutakhir minimal 20% 2. Terintegrasinya perpustakaan jurusan dan fakultas / PPs ke dalam perpustakaan pusat melalui jaringan LAN. 3. Dimilikinya system pelayanan perpustakaan berbasis web yang secara on-line dapat diakses oleh setiap fakultas dan jurusan 4. Terjalannya kerja sama antar perpustakaan dalam rangka <i>resources sharing</i> dengan minimal 5 perpustakaan nasional dan 2 perpustakaan internasional.	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi	1. Pembuatan system informasi berbasis web. 2. Peningkatan kemampuan tenaga fungsional perpustakaan menuju pelayanan on line. 3. Pembangunan jaringan LAN perpustakaan dari pusat sampai jurusan.	
	Meningkatnya fungsi laboratorium pendidikan	1. Terwujudnya laboratorium dasar terpadu untuk melayani pertumbuhan ilmu di universitas dan masyarakat. 2. Terwujudnya laboratorium		1. <i>Piloting micro teaching</i> berbahasa Inggris. 2. Pembuatan sistem informasi laboratorium.	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		mikro teaching untuk pendidikan profesi. 3. Tersedianya dokumen standar pelayanan laboratorium.			
	Perintisan Pembangunan Gedung Lembaga	Dimulainya pembangunan gedung Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian pada Masyarakat, dan Lembaga Pengembangan dan Pendidikan Profesi.		Perintisan Pembangunan Gedung Lembaga	
	Terwujudnya Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama UKM	Dibangunnya Gedung Sekretariat Bersama UKM		Pembangunan Gedung Sekretariat Bersama UKM	
	Terwujudnya Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) bagi mahasiswa.	Dibangunnya Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) bagi mahasiswa		Pembangunan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa)	
	Terwujudnya Pembangunan Laboratorium Pendidikan Terpadu.	Dibangunnya Laboratorium Pendidikan Terpadu		Pembangunan Laboratorium Pendidikan Terpadu	
	Terwujudnya Pembangunan Gedung Kampus FE, Hukum, Psikologi, dan Ilmu Kesehatan Masyarakat.	Dibangunnya Gedung Kampus FE		Pembangunan Gedung Kampus FE	
	Perintisan pembangunan kampus kelud sebagai <i>business and training centre</i>	Dimulainya pembangunan kampus Kelud sebagai <i>business and training centre</i>		Perintisan pembangunan kampus kelud menjadi <i>business and training centre</i>	
	Perintisan pembangunan kampus modern PGSD di Karanganyar	Dimulainya pembangunan kampus modern PGSD di Karanganyar		Perintisan pembangunan kampus modern PGSD di Karanganyar	
	Terwujudnya Pembangunan	Dibangunnya kawasan simpang		Pembangunan kawasan simpang empat	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	kawasan simpang empat	empat			
	Vitalisasi sarana jalan kampus	Dibangunnya jalan yang nyaman dan representatif di lingkungan kampus		Vitalisasi sarana jalan kampus	
	Diperolehnya data mengenai batas lahan Unnes	Tertatanya kembali patok pembatas lahan milik Unnes		Penataan kembali batas lahan Unnes	
	Terwujudnya pembangunan Kampung Budaya FBS sebagai pusat pembelajaran pemahaman antar budaya (<i>Cross Cultural Understanding</i>)	Dibangunnya Kampung Budaya FBS sebagai pusat pembelajaran pemahaman antar budaya (<i>Cross Cultural Understanding</i>)		Pembangunan Kampung Budaya FBS sebagai pusat pembelajaran pemahaman antar budaya (<i>Cross Cultural Understanding</i>)	
	Terwujudnya Pembangunan kelengkapan sarana perkuliahan dan praktek laboratorium fakultas.	Dibangunnya kelengkapan sarana perkuliahan dan praktek laboratorium fakultas.		Pembangunan kelengkapan sarana perkuliahan dan praktek laboratorium fakultas.	
G. Perluasan pendidikan kecakapan hidup					
Memperluas pendidikan kecakapan hidup melalui pengembangan kewirausahaan kampus	Pengembangan kewirausahaan kampus	Terbentuknya profit centre untuk menunjang pembiayaan perguruan tinggi	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pengembangan kewirausahaan kampus untuk perluasan pendidikan kecakapan hidup	Pengembangan kewirausahaan kampus melalui pendirian unit-unit usaha (POM Bensin, pusat pendidikan dan latihan, penginapan, argobisnis, layanan konsultasi teknik dan bisnis dan lain-lain)	
H. Mendorong jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia					
Meningkatkan jumlah jurusan di PT yang masuk dalam 100 besar Asia melalui perintisan kelas imersi dan pengembangan kerjasama	Dimilikinya Kelas Imersi	Terbentuknya kelas imersi minimal pada 2 program studi pada tiap fakultas	Kebijakan bidang ini diarahkan pada perintisan kelas imersi dan pengembangan kerjasama dalam rangka meningkatkan jumlah jurusan di PT	Perintisan Kelas imersi	
				Pengembangan kerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
			yang masuk dalam 100 besar Asia melalui		
I. Akselerasi jumlah program studi vokasi, dan profesi					
Meningkatkan jumlah program studi vokasi dan profesi	Meningkatnya jumlah kualitas dan kuantitas program studi vokasi	Terbentuknya program studi vokasi baru (2 program studi)	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan jumlah program studi vokasi dan profesi	Peningkatan program studi vokasi	
	Meningkatnya jumlah kualitas dan kuantitas program studi profesi	Terbentuknya program studi profesi baru (1 program studi)		Peningkatan program studi profesi	
J. Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah dan HaKI					
Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, HaKI melalui penelitian, jurnal ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pengurusan sertifikat HaKI	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah penelitian sebanyak 10% setiap tahun. Meningkatnya jumlah penelitian hibah, dan penelitian lainnya sebanyak 20% setiap tahunnya. Diperolehnya kepercayaan dari lembaga pemerintah dan swasta (perusahaan) untuk melakukan penelitian berskala nasional minimal 5 kegiatan. Dimilikinya jurnal terakreditasi nasional minimal 5 jurnal terakreditasi Dihasilkannya publikasi nasional minimal 100 artikel dan internasional minimal 15 artikel 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah, HaKI melalui penelitian, jurnal ilmiah, pengabdian masyarakat, dan pengurusan sertifikat HaK	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian Peningkatan kualitas dan kuantitas jurnal ilmiah. 	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebanyak 10% setiap tahun. 2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata bagi mahasiswa 3. Dimilikinya minimal 2 Desa Binaan. 4. Terwujudnya publikasi kegiatan-kegiatan unggulan pengabdian kepada masyarakat 		Peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian pada masyarakat	
	Perolehan dan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)	Diperolehnya sertifikat HaKI atas karya intelektual dosen dan mahasiswa.		Pengurusan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atas karya intelektual dosen dan mahasiswa	
K. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan					
Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan melalui pengembangan sistem pembelajaran berbasis ICT, peningkatan kemampuan ICT, dan optimalisasi fungsi sarana <i>teleconference</i>	<p>Terlaksananya program pembelajaran dengan menggunakan sistem, metode, dan materi pembelajaran berbasis ICT</p> <p>Meningkatnya kemampuan ICT</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya perangkat keras pembelajaran (alat pendidikan) berbasis ICT. 2. Dimilikinya satu kelas sebagai model pembelajaran berbasis ICT di tiap fakultas <ol style="list-style-type: none"> 1. sebanyak 50% pegawai memiliki kemampuan teknis SIM berbasis ICT. 2. Setiap unit kerja memiliki tenaga teknisi ICT minimal 2 orang. 3. Dimilikinya tim ICT universitas yang solid dan berkinerja tinggi. 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pengembangan sistem pembelajaran berbasis ICT, peningkatan kemampuan ICT, dan optimalisasi fungsi sarana <i>teleconference</i> guna menerapkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan	<p>Pengembangan sistem, metode, dan materi pembelajaran dengan menggunakan ICT</p> <p>Peningkatan kemampuan ICT melalui kegiatan pelatihan/workshop.</p>	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		4. Pimpinan unit kerja memiliki kemampuan akses SIM berbasis ICT sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan manajemen			
	Meningkatnya peran dan manfaat sarana <i>teleconference</i> baik secara internal maupun eksternal	1. Tersedianya sarana <i>teleconference</i> di masing-masing unit kerja 2. Digunakannya sarana <i>teleconference</i> sebagai media informasi antar lembaga secara rutin. 3. Digunakannya sarana <i>teleconference</i> sebagai media informasi secara internal antar unit kerja		Optimalisasi fungsi sarana <i>teleconference</i>	

PENGUATAN TATA KELOLA, AKUNTABILITAS, DAN PENCITRAAN PUBLIK

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
A. Peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran					
Meningkatkan kompetensi aparat dalam perencanaan dan penganggaran melalui pengembangan sistem perencanaan berbasis	Terlaksananya sistem perencanaan berbasis kinerja	1. Tersusunnya dokumen SP4 2. Tersusunnya DIPA 3. Tersusunnya dokumen lakip sebagai dasar penyusunan perencanaan periode berikutnya	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pengembangan pengembangan sistem perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan	Pengembangan sistem perencanaan berbasis kinerja	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
kinerja, pengelolaan anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah, dan pengelolaan barang milik negara.		4. Terselenggaranya pelatihan penyusunan sistem perencanaan berbasis kinerja	anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah, dan pengelolaan barang milik negara.		
	Tertatanya sistem pengelolaan anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah	1. Terlaksananya mekanisme penerimaan uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Terlaksananya mekanisme peneluaran uang yang sesuai dengan ketentuan 3. Tercatatnya transaksi keuangan sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku 4. Tersusunnya laporan keuangan sesuai sistem akuntansi pemerintah 5. Terselenggaranya pelatihan sistem pengelolaan anggaran		Penataan sistem pengelolaan anggaran sesuai sistem akuntansi pemerintah	
	Tertatanya sistem pengelolaan barang milik negara	1. Tercatatnya seluruh barang milik negara di masing-masing unit kerja sesuai ketentuan yang berlaku 2. Terjaminnya kesesuaian daftar barang milik negara antara catatan dan kondisi fisik 3. Tersusunnya laporan barang milik negara secara periodik sesuai dengan peraturan yang berlaku 4. Terselenggaranya pelatihan sistem pengelolaan barang		Penataan pengelolaan barang milik negara	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
		milik negara			
B. Peningkatan kapasitas dan kompetensi managerial aparat					
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi managerial aparat melalui spesifikasi keahlian manajemen	Terciptanya spesifikasi keahlian manajemen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya pola pembinaan pegawai yang berorientasi pada terciptanya bidang keahlian khusus pegawai dan profesionalisme yang optimal. 2. Dimilikinya bidang keahlian manajemen. 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada spesifikasi keahlian manajemen yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi managerial aparat	Spesifikasi keahlian manajemen.	
C. Penataan regulasi pengelolaan pendidikan					
Menata regulasi pengelolaan pendidikan melalui penguatan kapasitas lembaga menuju BHPT dan penataan lembaga kemahasiswaan	Menguatnya kapasitas lembaga menuju BHPT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin mantapnya bidang akademik menuju rencana BHPT 2. Semakin mantapnya bidang keuangan menuju rencana BHPT 3. Semakin mantapnya kualitas dan prestasi bidang kemahasiswaan. 4. Tersusunnya proposal BHPT. 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga menuju BHPT dan penataan lembaga kemahasiswaan untuk penataan regulasi pengelolaan pendidikan	Penguatan kapasitas lembaga menuju BHPT	
	Tertatanya Lembaga Kemahasiswaan yang fungsional dan profesional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya secara organisatoris dan fungsional lembaga MPM, DPM, BEM, dan UKM. 2. Berfungsinya lembaga MPM, DPM, BEM, dan UKM secara profesional. 		Penataan Lembaga Kemahasiswaan diiringi dengan penguatan fungsi dan peran lembaga tersebut	
D. Peningkatan pencitraan publik					
Meningkatkan citra	Meningkatnya kualitas	1. Dokumentasi karya prestasi	Kebijakan bidang ini	Peningkatan kualitas publikasi kegiatan	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
lembaga melalui publikasi kegiatan kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, fasilitasi bursa kerja, dan promosi lembaga	publikasi kegiatan kemahasiswaan (pencitraan publik) sebagai ajang promosi keunggulan	<ol style="list-style-type: none"> mahasiswa dalam bentuk cetak dan film. Terpublikasinya karya prestasi mahasiswa. Masyarakat mengenal karya prestasi mahasiswa 	diarahkan pada peningkatan kualitas publikasi kegiatan kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, fasilitasi bursa kerja, dan promosi lembaga untuk meningkatkan citra lembaga	kemahasiswaan sebagai sarana upaya pencitraan publik melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan (media cetak, elektronik, pengiriman duta seni ke luar negeri, dan lain lain).	
	Terjalinn hubungan (<i>net working</i>) yang sinergis antara bidang kemahasiswaan Unnes dengan para alumni	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat data yang akurat tentang alumni. Terjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif antara alumni dengan Unnes. Alumni sebagai media promosi keunggulan bidang kemahasiswaan. 		Pemberdayaan Alumni menjadi <i>net working</i> yang sinergis	
	Terbentuknya fasilitasi bursa kerja	<ol style="list-style-type: none"> Para lulusan mampu mengakses kesempatan kerja baik di dalam maupun luar negeri. Para stakeholders mengenali potensi tenaga kerja lulusan Unnes. Tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja meningkat 		Pembentukan <i>Job Placement Centre</i> dengan revitalisasi kerja sama	
	Promosi Keunggulan Universitas	Meningkatnya citra Unnes di mata publik.		Pengembangan promosi Keunggulan Universitas	
E. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola pendidikan					
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan pendidikan melalui pembentukan auditor internal	Terbentuknya Auditor internal	<ol style="list-style-type: none"> Dilantiknya tim auditor internal Dihasilkannya laporan auditor sebagai bentuk kontrol keuangan lembaga 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pembentukan auditor internal untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelolaan ped.	Pembentukan tim Auditor internal	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
F. Pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi					
Mengembangkan aplikasi SIM secara terintegrasi untuk bidang akademik, kepegawaian, aset, dan keuangan	Terwujudnya sistem informasi akademik terpadu dalam <i>single platform</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terintegrasinya system akademik terpadu (Sikadu) dengan data dasar yang unik. 2. Terwujudnya interface SIM akademik untuk keperluan Evaluasi program studi berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) 3. Terwujudnya interface SIM untuk pengambilan keputusan pada tugas manajemen. 	Kebijakan bidang ini diarahkan pada pengembangan aplikasi SIM secara terintegrasi untuk bidang akademik, kepegawaian, aset, dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan modul SIKADU. 2. Pengintegrasian sistem 3. Perumusan user privileges dalam rangka desentralisasi kewenangan akademik. 	
	Terwujudnya Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web. 2. Dibangunnya jaringan sistem informasi manajemen kepegawaian di tingkat fakultas 		Penyusunan Sistem informasi manajemen kepegawaian berbasis web	
	Terwujudnya Sistem Informasi Aset (SIA) berbasis web	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi Aset berbasis web. 2. Dibangunnya jaringan Sistem Informasi Aset di tingkat fakultas 		Penyusunan Sistem informasi Aset berbasis web	
	Terwujudnya Sistem Informasi Keuangan (SIK) berbasis web	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersedianya Sistem Informasi keuangan berbasis web. 4. Dibangunnya jaringan Sistem Informasi Keuangan di tingkat fakultas 		Penyusunan Sistem informasi Keuangan berbasis web	

Tujuan	Sasaran		Cara mencapai tujuan dan sasaran		Keterangan
	Uraian	Indikator	Kebijakan	Program	
	Terbentuknya integrasi sistem informasi akademik, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana secara terpadu dalam satu tata kelola yang menghubungkan antar kampus	1. Dibangunnya sistem informasi akademik, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana secara terpadu.		Penyusunan Integrasi sistem informasi akademik, kepegawaian, keuangan dan sarana prasarana secara terpadu dalam satu tata kelola yang menghubungkan antar kampus	

BAB IV

STRATEGI PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Dalam rangka pelaksanaan program, perlu diupayakan usaha-usaha untuk memperoleh dana dari berbagai sumber, baik dari pemerintah, masyarakat maupun bantuan luar negeri.

1. Anggaran Pemerintah (APBN rupiah murni)

Dana rupiah murni bersumber dari pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan rutin dan pembangunan dalam penyelenggaraan tugas pokok/fungsi suatu instansi. Dana rupiah murni meliputi gaji dan tunjangan, belanja barang, belanja modal dan bantuan sosial. Secara rutin Unnes mengusulkan dana berdasarkan kebutuhan yang disusun sesuai prioritas kebutuhan dan prediksi kemampuan/ketersediaan dana.

2. Dana Masyarakat

Dana masyarakat yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), bersumber dari: (a) sumbangan penyelenggaraan pendidikan, (b) biaya seleksi masuk mahasiswa baru (c) hasil kontrak/kerjasama, (d) hasil penjualan produk, dan (e) hibah/bantuan yang tidak mengikat.

3. Dana Bantuan Luar Negeri

Dana bantuan luar negeri bersumber dari bantuan negara donor, lembaga keuangan/perbankan seperti: *Islamic Development Bank (IDB)*, *World Bank*, *Asian Development Bank (ADB)* dan perguruan tinggi serta lembaga lain di luar negeri.

B. STRATEGI PENGGALIAN DANA

Strategi penggalan dana yang dilakukan disesuaikan dengan jenis sumber dana dan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

1. Anggaran Pemerintah (APBN rupiah murni)

Guna memenuhi kebutuhan yang selalu meningkat dan keterbatasan dana yang tersedia, Unnes berupaya untuk meraih dana dari pemerintah melalui mekanisme usulan dalam APBN. Peraihan dana dilakukan dengan menyusun program dengan skala prioritas, baik untuk kebutuhan rutin maupun pembangunan. Selain itu secara terus menerus mendorong dan memfasilitasi berbagai komponen di Unnes agar meraih dana dari berbagai hibah yang disediakan oleh pemerintah. Unnes menyediakan dana pendamping sebagai prasyarat memperoleh dana-dana hibah.

Strategi yang dilakukan untuk meraih dana tersebut, dikembangkan melalui jaringan akses dengan berbagai pihak dan membangun komunikasi secara lebih optimal, baik secara formal maupun nonformal.

2. Dana Masyarakat

a. Sumbangan penyelenggaran pendidikan

Untuk mengoptimalkan penerimaan dana ini, diusahakan melalui peningkatan penerimaan Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan sarana pendidikan, terutama pada jurusan yang diminati masyarakat dengan menerapkan subsidi silang dan disesuaikan dengan kemampuan orang tua mahasiswa.

b. Biaya seleksi masuk

Untuk mengoptimalkan penerimaan dana ini diusahakan untuk meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru di Unnes, khususnya yang melalui jalur SPMU. Untuk itu mekanisme pendaftaran secara *on line*, dan promosi yang lebih efektif baik melalui media cetak atau elektronik, perlu dilakukan secara lebih optimal.

c. Hasil kontrak kerjasama

Untuk mengoptimalkan penerimaan dana ini, perlu dilakukan pembukaan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri yang dapat memberi kontribusi kepada Unnes.

d. Hasil penjualan produk

Untuk meningkatkan penerimaan dana ini, perlu dilakukan inventarisasi kegiatan yang dapat menarik minat pengguna barang/jasa yang dihasilkan Unnes. Selanjutnya diupayakan untuk menarik investor yang dapat memanfaatkan produk Unnes. Dalam hal ini perlu diupayakan pendirian unit-unit usaha baru yang berorientasi pada *profit*.

e. Hibah/bantuan

Untuk meningkatkan penerimaan dana ini, perlu diupayakan perolehan hibah dari masyarakat dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan para donatur/dermawan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

3. Dana Bantuan Luar Negeri

Untuk meningkatkan penerimaan dana ini, perlu dilakukan pendekatan dengan berbagai lembaga donor di luar negeri, baik lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga sosial. Untuk itu perlu disusun *company profile* Unnes maupun proposal yang dapat dijual kepada berbagai lembaga donor di luar negeri.

C. STRATEGI PENGELOLAAN DANA

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang perlu dikembangkan adalah: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Melalui prinsip-prinsip tersebut diharapkan anggaran yang diperoleh dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil kinerja sesuai dengan perencanaan.

Dalam rangka mendukung prinsip pengelolaan keuangan, ditetapkan strategi pengelolaan dana sebagai berikut .

1. Alokasi dana secara proporsional

Unit-unit kerja mendapatkan porsi anggaran sesuai dengan kebutuhan, agar pelaksanaan tugas pokok yang diemban dapat dilaksanakan dengan lancar. Alokasi anggaran yang akan dikembangkan berdasarkan asas proporsionalitas, yang sesuai dengan beban tanggung jawab unit kerja dan kebutuhan yang harus dipenuhinya, bukan karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan.

2. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana

Rencana yang sudah disusun dan disepakati digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan setiap kegiatan. Untuk itu, dalam rangka pelaksanaan anggaran Unnes mengacu pada perencanaan yang disusun berdasarkan kinerja dan prioritas kebutuhan pada setiap unit kerja. Dalam hal ini perlu diupayakan keselarasan antara Renstra, RKT, SP4, RKA-K/L, DIPA, dan LAKIP.

3. Pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai ketentuan

Dana yang sudah digunakan melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja, harus dipertanggungjawabkan dengan benar menurut sistem akuntansi keuangan. Pertanggungjawaban keuangan tersebut wajib dilakukan oleh setiap pengguna dana yang melaksanakan kegiatan. Pertanggungjawaban keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

4. Pelaporan hasil pengelolaan anggaran secara tertib

Laporan hasil pengelolaan anggaran disusun secara cermat dan dikirim kepada pihak terkait (intenal maupun eksternal) secara tepat waktu dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

D. PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan kegiatan yang didalamnya terdapat dana yang harus dikelola, maka perlu mempertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Pertanggungjawaban anggaran dibagi dalam dua kelompok, yakni (1) Pertanggungjawaban Dana APBN, dan (2) Pertanggungjawaban Dana Bantuan Luar Negeri.

1. Pertanggungjawaban Dana APBN

Dana APBN harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan pagu yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), diatur berdasarkan Peraturan Presiden, dan Peraturan

Pelaksanaan lainnya. Pertanggungjawaban Anggaran harus mengacu pada standar akuntansi Pemerintah melalui aplikasi Sistem Akuntansi Pemerintah yang telah dikembangkan oleh Departemen Keuangan.

2. Pertanggungjawaban Dana Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri yang diterima harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan tepat sasaran. Model dan mekanisme pertanggungjawabannya akan disesuaikan dengan ketentuan dari lembaga donor.

BAB V

SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari renstra ini. Sistem pemantauan dan evaluasi bertujuan mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam Renstra UNNES 2006 - 2010 dengan hasil yang dicapai berdasarkan kebijakan yang diimplementasi melalui kegiatan dan/atau program di tingkat universitas, fakultas/lembaga dan, jurusan secara berkala.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam konteks otonomi yang ditempuh melalui proses perancangan, perencanaan, implementasi program dan hasilnya di semua tingkatan. Proses ini sekaligus sebagai pemberdayaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparat pemantauan dan evaluasi di berbagai tingkatan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga program otonomi pendidikan dilaksanakan dengan baik dalam lima tahun mendatang.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh lembaga yang lebih tinggi terhadap lembaga yang lebih rendah sampai kesatuan pelaksana pendidikan. Pemantauan dan evaluasi internal melakukan kegiatan memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan yang bersifat akademis dan nonakademis.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi ada tiga jenis yaitu (1) pemantauan dan evaluasi eksternal yang dilakukan oleh pendidikan tinggi tim pemantauan dan evaluasi (MONEV) yang dibentuk oleh lembaga independen yaitu Dewan Pendidikan Tinggi (DPT), (2) pemantauan dan evaluasi Universitas Negeri Semarang yang dilakukan tim independen, yaitu pemantauan internal (MONEV-IN) yang merupakan bagian dari sistem Penjaminan Mutu UNNES, dan (3) pemantauan dan evaluasi non-independen yang merupakan tugas

pejabat struktural di berbagai level (sesuai dengan tupoksinya) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di level bawahnya.

A. Tujuan

Tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah :

1. mengetahui dukungan dan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan program dan melihat keselarasan antara visi, misi universitas dan fakultas serta renstra 2006-2010 dengan pelaksanaan program-program.
2. menilai tingkat pencapaian indikator kinerja atau target yang ditetapkan dari sisi kuantitatif, metode pengukuran, maupun cakupan indikator yang meliputi indikator utama (*out come indicator*) maupun indikator tambahan (*process & output based indicator*).
3. mengidentifikasi masalah atau hambatan dan cara penanggulangan yang ditempuh.
4. menilai kemajuan yang dicapai dalam melaksanakan pengadaan sumber daya pendukung yang diperlukan dan melakukan *cross chek* terhadap pengadaan fasilitas pendukung pembelajaran maupun kapasitas pembelajaran.
5. menilai status kemajuan fisik dan daya serap keuangan pada kompen kegiatan yang direncanakan oleh lembaga.
6. membantu pimpinan untuk mengetahui jalannya kegiatan atau kemajuan pelaksanaan program serta memberikan saran dan rekomendasi sebagai bahan membuat kebijakan.

B. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip-prinsip pelaksanaan pemantauan dan evaluasi berdasarkan ;

1. kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan - evaluasi,
2. dilakukan secara objektif,
3. dilakukan oleh petugas yang memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman melaksanakan pemantauan dan evaluasi,
4. transparan, sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan hasilnya dilaporkan kepada *stakeholders*,
5. melibatkan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif),
6. pelaksana yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal (*akuntabel*),
7. mencakup seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan dan evaluasi (*komprehensif*),
8. pelaksanaan dilakukan dengan jadwal yang ditentukan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan momentum yang sedang terjadi,
9. dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan,
10. berbasis indikator kinerja, dan
11. efektif dan efisien,

C. Strategi Pemantauan dan Evaluasi

Agar tujuan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana yang diharapkan dapat tercapai serta terpenuhinya prinsip-prinsip pelaksanaan *monev*, perlu adanya beberapa strategi yang dirancang dan diimplementasikan sebagai berikut.

1. Kelembagaan Pemantauan dan Evaluasi Internal:

Kedudukan kelembagaan tim pemantauan dan evaluasi internal sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Universitas

bersifat independen dan fungsional. Tim monev internal dibentuk oleh pimpinan UNNES dengan persyaratan (1) memiliki sifat independen (beranggotakan pejabat nonstruktural), (2) bebas dari konflik kepentingan, dan (3) ada rincian tugas yang jelas, dan (4) beranggotakan dosen yang memiliki kemampuan, pernah menjadi *reviewer*, atau *task force*, atau pernah menjadi pejabat *Local Project Implementation Unit* (LPIU), Sistem Penjaminan Mutu Universitas (SPMU), dan mempunyai komitmen tinggi dalam menjalankan tugas. Tim pemantauan internal ini merupakan kepanjangan tangan dari tim Monev eksternal sebagai bagian sistem Dewan Pendidikan Tinggi (DPT) yang dibentuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

2. Pendekatan dan Sasaran Pemantauan dan Evaluasi Internal

Dalam pendekatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan melalui tiga pendekatan yang seimbang, yaitu:

- a) **indikator kinerja**, (1) bersumber dokumen untuk mendapatkan indikator-indikator kinerja *input, proses, output, dan outcome*. (2) Arah kegiatan monev internal untuk mendapatkan dan menganalisis kemajuan-kemajuan, rencana kerja, dan data pencapaian kemajuan, hambatan. Jika ada kesalahan harus ditemukan tindakan koreksi.
- b) **validasi**, untuk pengecekan-pengecekan apakah laporan kemajuan telah dibuat melalui kunjungan lapangan, cek titik-titik (kendali) kritis (*spot checks*), *client survey*, assesmen dari luar.
- c) **partisipasi**, untuk memperoleh *feed back* tentang kemajuan kegiatan dari para *stakeholders*, kelompok *outcome* dan *beneficiaries* sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan, dan agar atasan *well informed*.

Sasaran utama pelaksanaan pemantauan dan evaluasi adalah (1) menjaga komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan program, (2)

memantau pelaksanaan program sesuai dengan prosedur operasional dan internal manajemen yang telah digariskan, (3) memantau dan mengevaluasi keterlibatan aktif staf pengajar dan staf administrasi dalam program yang telah direncanakan, (4) memantau dan mengevaluasi peran serta mahasiswa dalam program kegiatan, serta tingkat kepuasan para mahasiswa, (5) mengevaluasi hasil kegiatan pelaksanaan program, dan (6) mengevaluasi laporan dan rekaman pengelolaan program.

3. Siklus Manajemen dan Prosedur Pelaksanaan

a) Siklus Manajemen

Siklus manajemen sistem pemantauan dan evaluasi meliputi perencanaan, implementasi, monev, perencanaan, dan seterusnya. Keefektifan siklus sistem manajemen perlu diaudit. Fokus monev internal adalah kinerja proses dan produk.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi program hibah kompetisi yang dilaksanakan oleh monev-in dilakukan secara periodik setiap tahun yaitu pada awal pelaksanaan hibah (*baseline pemantauan and evaluation*); pertengahan pelaksanaan hibah (*mid term pemantauan and evaluation*); dan akhir pelaksanaan hibah (*final pemantauan and evaluation*). Namun demikian, secara lebih luwes sesuai dengan kebutuhan dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi.

b) Prosedur Pelaksanaan

Prosedur pelaksanaan pemantauan dan evaluasi internal dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

- telaah dokumen rencana implementasi program dan pelaporan, bertujuan mengetahui indikator kinerja yang ditetapkan dan pencapaiannya, program pengembangan yang disusun apakah sudah mengacu kepada renstra UNNES,

dan program pengembangan apakah mencerminkan sebuah aktivitas ataukah infestasi.

- pemantauan, bertujuan melihat dan klarifikasi tingkat capaian indikator kinerja terhadap target, apakah dalam implementasinya sesuai rencana, apakah terdapat kendala dan hambatan dalam implementasi program dan bagaimana solusinya, dan bagaimana rancangan keberlanjutannya apabila program ini telah berakhir. Tim monev internal sebagai mitra kerja akan membantu untuk menyelesaikan masalah. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan dengan bentuk kegiatan; *observe, scrutinize, keep an eye on, supervise, watch and examine*.
- evaluation, bertujuan mengevaluasi keberhasilan program berdasarkan data dokumen dan hasil pemantauan. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan dengan tindakan; *assessment, appraisal, estimate, valuation, coasting*.
- *feedback*, ke system pengambil keputusan dan membentuk siklus perbaikan mutu kontinyu (CQI).

Untuk memahami kegiatan monev-in lebih operasional perlu disusun prosedur operasional dengan tahapan sebagai berikut:

- setelah dibentuk tim monev-in perlu melakukan koordinasi internal untuk memahami tugas dan fungsinya, memahami satuan unit pelaksana yang perlu di pantau dan evaluasi, menyusun rencana kerja, menyiapkan instrumen, menyusun jadwal kunjungan (*site visite*) monev-in.
- melaksanakan *desk evaluation*, dengan melakukan telaah dokumen, hasil telaah berupa *review coment*, menyusun *check list* , menentukan jadwal *site visite* dengan *grantee*, mengirim surat permohonan ke *grantee* dengan lampiran *review coment*.

- melaksanakan kegiatan *site visite*, secara berurutan menemui (1) pimpinan fakultas/ jurusan/prodi, (2) tim Task force, (3) dosen dan staf administrasi, (4) mahasiswa, (5) pihak-pihak yang dianggap penting (*stakeholders*).
- melakukan evaluasi melalui pembahasan dan analisis hasil *site visite*.
- penyusunan laporan hasil monev disertai saran dan rekomendasi.
- menyampaikan laporan hasil monev ke Rektor sebagai bahan pengambilan kebijakan.

D. Indikator Kinerja

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap kinerja UNNES yang mencakup aspek teknis, administrasi, dan pengelola kegiatan atau program pendidikan UNNES. Pemantauan dan evaluasi pada hakikatnya untuk mengukur kesesuaian antara pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam jangka menengah renstra UNNES, dengan target yang dapat dicapai melalui strategi pelaksanaan tertentu. Oleh sebab itu, indikator kinerja dirumuskan secara spesifik, jelas, relevan, dapat dicapai, dapat dikuantitatifkan, dapat diukur secara objektif, serta fleksibel terhadap perubahan.

Indikator kinerja yang diukur dapat bersifat fisik dan nonfisik. Yang bersifat fisik misalnya pembangunan sarana prasarana fisik, angka keketatan pendaftaran mahasiswa baru, dan angka *dropout*. Yang nonfisik misalnya peningkatan IP kumulatif lulusan, masa tunggu mahasiswa, nilai rerata NEM mahasiswa baru, nilai TOEFL mahasiswa, perilaku mahasiswa dll.

Secara umum terdapat empat jenis indikator kinerja yang biasa digunakan sebagai acuan dalam pemantauan dan evaluasi atau pengukuran kinerja organisasi, yaitu:

- 1) indikator masukan (*input*), yang mencakup antara lain kurikulum, mahasiswa, dana, sarana dan prasarana belajar, data dan informasi, dosen, gedung kuliah, sumber belajar, motivasi belajar, kebijakan dan peraturan, serta perundangan yang berlaku.
- 2) indikator proses, yang meliputi antara lain lama waktu studi, kesempatan mengikuti belajar, jumlah yang putus kuliah, efektivitas pembelajaran, kualitas proses pembelajaran, dan metode pembelajaran.
- 3) indikator keluaran (*output*), yang meliputi nilai IPK kumulatif lulusan, nilai toefl bahasa Inggris jumlah lulusan yang *cumlaude*, dan lain-lain
- 4) indikator dampak (*outcome*) antara lain jumlah mahasiswa yang bekerja, masa tunggu mahasiswa mendapat pekerjaan, pengaruh para lulusan terhadap mutu angkatan kerja, peran mahasiswa dalam pembangunan lingkungan, dan peran lulusan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya.

BAB VI

PENUTUP

A. KRITERIA KEBERHASILAN

Rencana Strategis ini berhasil apabila:

1. menjadi pedoman Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4);
2. semua pejabat di lingkungan Universitas Negeri Semarang mengetahui isi Renstra, menjadi pedoman kerja, dan mensosialisasikan kepada semua dosen dan staf administrasi serta para mahasiswa;
3. tujuan yang dirumuskan dapat tercapai; dan
4. dapat dirumuskan indikator kinerja universitas yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala;

B. STANDAR KINERJA

Dalam lima tahun mendatang ini Unnes harus dapat mengembangkan dan merumuskan standar kinerja yang meliputi:

1. manajemen;
2. pengembangan;
3. otomasi dan ICT;
4. proses belajar-mengajar;
5. atmosfer akademik;
6. kurikulum;
7. ketenagaan;
8. perpustakaan;
9. laboratorium;
10. kemahasiswaan.

Standar kinerja ini dipakai sebagai indikator kemajuan pengembangan Unnes.